

**Laporan Hasil Pengawasan
atas Pengelolaan Pengurus terhadap Dana Pensiun Perhutani
2009**

I. Pendahuluan

Dana Pensiun Perhutani (DPP) didirikan oleh Direksi Perum Perhutani pada 9 Mei 1997 dan telah disetujui oleh Dirjen Pembinaan BUMN atas nama Menteri Keuangan pada 8 Juli 1997. Adapun Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari DPPHT yang paling baru disahkan Menteri Keuangan pada 18 November 2002 dan telah dimuat dalam Tambahan No. 59/ Dapen dari Berita Negara No. 101, 17 Desember 2002.

Sesuai dengan Pasal 5 PDP dari DPP, maksud pembentukan DPPHT adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti.

Agar DPPHT dapat berjalan dengan baik, maka DPPHT perlu dikelola dengan baik pula sehingga kepentingan semua *stakeholders* terlindungi. Oleh karena itu, Direksi Perum Perhutani menunjuk Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun **Pengurus** DPPHT periode 2009-2014 terdiri atas:

Direktur Utama	: Dr. Djoko Wijanto, MM
Direktur Pengembangan dan Kepesertaan	: Ir. Sri Murtiningsih, MM
Direktur Umum dan Keuangan	: Dra. Lestrina Surbakti,

Sedangkan **Dewan Pengawas** DPPHT periode 2009-2014 terdiri atas:

(Wakil Pemberi Kerja)	: A. N. S Kosasih
Anggota (Wakil Pemberi Kerja)	: Imam Sandjojo
Anggota (Wakil Peserta)	: Agus Hermansjah
Anggota (Wakil Peserta)	: Damami Abrori

Selanjutnya, sesuai dengan Ayat 1 dan 2, Pasal 16, PDP dari DPP, Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan DPP yang dilakukan oleh

Pengurus, dan wajib menyampaikan laporan tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta. Secara lebih spesifik, dalam Pasal 12 Ayat 3, Arahan Investasi 2009 DPP dinyatakan bahwa Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi Dana Pensiun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pendiri setiap tahun.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut Laporan Pengawasan ini disusun. Laporan ini dibuat dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Peraturan terkait dengan pengelolaan DPP (misalnya, PMK 199/2008);
2. Pengamatan/pengawasan sehari-hari atas pengelolaan DPP oleh Pengurus dengan mendasarkan pada PDP 2002, Arahan Investasi 2009, Rencana Investasi 2009, serta Rencana Kerja dan Anggaran 2009 DPP.
3. Laporan Aktuaris per 31 Desember 2009 oleh Aktuaris Sumarti, FSAI dari PT Dian Artha Tama, Jakarta
4. Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008, serta Laporan Investasi untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 oleh Akuntan Drs. Theo Kusnawara, Ak. dari Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan yang merupakan anggota dari PKF International Limited.

II. Keuangan

Dalam Laporan Auditor Independen, Drs. Theo Kusnawara, Ak. dari Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan menyatakan bahwa Laporan Keuangan (Laporan Aktiva Bersih, Neraca, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas) DPP untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sedangkan posisi keuangan DPP untuk tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta perubahan aktiva bersih, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah Perubahan Aktiva Bersih.

Aktiva bersih akhir 2009 meningkat sebesar Rp. 257.015.853.092,00 dari aktiva bersih akhir 2008 sebesar Rp. 478.634.536.548,00 menjadi Rp. 735.650.389.640,00. Kenaikan ini amat signifikan mengingat pada 2008 nilai aktiva bersih mengalami penurunan sebesar Rp. 137.684.874.778. Kenaikan aktiva bersih 2009 terutama disebabkan oleh pendapatan investasi sebesar Rp. 73.578.861.220,00; peningkatan investasi sebesar Rp. 116.084.786.568,00; dan iuran tambahan sebesar Rp. 106.706.208.620,00.

Peningkatan investasi 2009 sebesar Rp. 116.084.786.568,00 terutama disebabkan oleh telah pulihnya nilai investasi di saham dan reksadana setelah turun drastis di 2008. Perlu dicatat bahwa selisih penilaian investasi (SPI) saham pada 2008 sebesar Rp. 62.116.510.963,00) menjadi Rp. 723.899.079,00 pada 2009; sedangkan SPI reksadana pada 2008 Rp. 51.165.887.745 telah menjadi Rp. 1.556.705.601,00 pada 2009.

Selain dari hasil investasi, kekayaan DPP juga meningkat karena adanya iuran normal dan iuran tambahan. Jika dibandingkan dengan iuran 2008, iuran 2009 mengalami peningkatan yang berarti sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Iuran Normal dan Iuran Tambahan Tahun 2009 dan Tahun 2008

NO	IURAN	2009 (Rp)	2008 (Rp)
1	2	3	4
1	Normal		
	- Pemberi Kerja	10.193.301.414	9.925.222.504
	- Peserta	5.482.075.538	5.773.568.512
2	Tambahan	106.760.208.620	10.361.127.340
3	Jumlah	122.435.585.572	26.059.918.356

Namun demikian Pemberi Kerja belum melunasi iuran tambahan 2009 tersebut sehingga muncul sebagai piutang iuran tambahan sebesar Rp. 103.536.273.734,00 karena telah dikurangi dengan kelebihan iuran normal sebesar Rp. 3.223.934.896,00. Atas piutang tersebut, telah dikenakan bunga keterlambatan iuran sebesar Rp. 1.351.751.943,00 yang dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Hal ini telah sesuai dengan Ayat 6 Pasal 25 PDP dari DPP.

Selanjutnya, nilai aktiva bersih 2009 juga dipengaruhi oleh 3 komponen utama yaitu beban investasi, beban operasional, dan pembayaran manfaat pensiun. Dibandingkan dengan tahun 2008, beban investasi dan operasional 2009 justru turun masing-masing sebesar 18,74% dan 9,95%. Sedangkan pembayaran manfaat pensiun 2009 meningkat 23,72% dari pembayaran manfaat pensiun 2008.

Tabel 2. Perbandingan antara Beban Investasi, Beban Operasional, dan Manfaat Pensiun Tahun 2009 dan Tahun 2008

No	Uraian	Th 2009 (Rp)	Th 2008 (Rp)	RKA 2009 (Rp)	% (3:4)	% (3:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Beban Investasi	1.175.133.393	1.446.200.076	2.013.000.000	81.26	58.38
2	Beban Operasional	10.015.640.191	11.122.170.183	13.140.000.000	90.05	76.22
3	Manfaat Pensiun	45.890.831.606	37.091.687.918	41.000.000.000	123.72	111.93

Jika dibandingkan dengan RKA 2009 DPP, beban investasi dan beban operasional 2009 turun masing-masing sebesar 41,26% dan 23,78%. Adapun pembayaran manfaat pensiun 2009 naik sebesar 11,93%.

III. Investasi

Dalam Laporan Auditor Independen, Drs. Theo Kusnawara, Ak. dari Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan menyatakan bahwa Laporan Portofolio Investasi DPP untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan Pengurus telah membuat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Laporan Portofolio Investasi 2009 DPP telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, dan Arahan Investasi tahun 2009 DPP.

a. Portofolio Investasi

Menurut Laporan tersebut, realisasi per jenis investasi tidak melampaui batas maksimum investasi untuk jenis tertentu, baik yang ditetapkan dalam Arahan Investasi maupun Keputusan Menteri Keuangan RI. Selain itu, penempatan investasi pada satu pihak telah dilaksanakan sesuai dengan Arahan Investasi maupun Keputusan Menteri Keuangan RI, dan tidak ada batasan maksimum investasi pada satu pihak yang dilanggar. Berikut ini posisi portofolio investasi tahun 2009 DPP :

Tabel 3. Portofolio Investasi Dana Pensiun Perhutani tahun 2009

NO	JENIS INVESTASI	JUMLAH	PROPORSI THD JML INV	AI 2009 (Maks)	PMK 199/2008 (Maks)	RENCANA INV 2009
		Rp	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Berharga Negara	113.543.571.991	18,76	80	100	20
2	Deposito Berjangka	32.625.000.000	5,39	80	100	10
3	DOC	9.250.000.000	1,52	80	100	

4	Saham yg tercatat di BEI	181.478.295.601	29.98	60	100	30
5	Obligasi yg tercatat di BEI	114.857.569.665	18.97	60	100	20
6	Reksadana: Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, Saham	153.563.164.033	25.37	60	100	20
		605.317.601.290	100			100

Jika tabel di atas diperhatikan, hanya penempatan pada reksadana yang melampaui batasan alokasi Rencana Investasi 2009. Realisasi proporsi portofolio investasi reksadana lebih tinggi sebesar 5,37% daripada rencananya.

Selain itu, sebenarnya ada batasan kualitatif yang harus dimasukkan dalam Arahkan Investasi sebagaimana dalam PMK 199/2008, Ayat 1, Pasal 7 yaitu obligasi, sukuk dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset harus memperoleh peringkat sekurang-kurangnya **A** atau yang setara dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya, menurut Pasal 18, Ayat 1, kesesuaian terhadap batasan investasi ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan Ayat 3, pembuktian kesesuaian terhadap batasan investasi merupakan tanggung jawab Pengurus.

Dari Rincian Obligasi di Lampiran V, Laporan Investasi tahun 2009 DPP, dapat diketahui bahwa DPP masih (1) memiliki beberapa obligasi dengan peringkat id A- seperti obligasi: PT Adhi Karya IV 2007, PT Bakrie Telecom I 2007, PT Bank BNI I 2003, PT BEI III 2006 Seri B dan C, PT Cilandra Perkasa II 2007, dan PT PAM Lyonnais Jaya I 2005 Seri C. (2) belum memisahkan antara obligasi dan sukuk.

Untuk mengetahui apakah kepemilikan obligasi dibawah peringkat A melanggar PMK 199/2008 atau tidak, perlu dicantumkan **waktu perolehan obligasi atau sukuk** tersebut. Kepemilikan obligasi/sukuk dibawah peringkat A dianggap tidak melanggar PMK tersebut jika (1) dibeli saat sebelum PMK tersebut terbit yaitu 5 Desember 2008, atau (2) dibeli setelah PMK tersebut terbit dengan peringkat lebih tinggi dari A tetapi dalam penilaian berikutnya peringkatnya turun di bawah A.

Dari tabel di atas dapat juga diketahui bahwa dalam Rencana Investasi 2009 tidak ada jenis investasi DOC. Namun, realisasi portofolio investasi 2009 menunjukkan adanya proporsi DOC sebesar 1,52%.

Dibandingkan dengan 2008, portofolio investasi 2009 berubah secara signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Perubahan ini terutama didorong

oleh telah pulihnya kondisi investasi di BEI yang mendorong meningkatnya investasi di saham dan reksadana.

Tabel 4. Prosentase Rencana Portofolio Investasi tahun 2009 dan tahun 2008

N O	JENIS INVESTASI	RENCANA INVESTASI	PROPORSI THD JUMLAH INVESTASI (%)	
		2009	2009	2008
1	2	3	4	5
1	Surat Berharga Negara	20	18,76	27,76
2	Deposito Berjangka	10	5,39	11,62
3	DOC		1,52	
4	Saham yg tercatat di BEI	30	29,98	16,91
5	Obligasi yg tercatat di BEI	20	18,97	27,64
6	Reksadana: Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, Saham	20	25,37	16,07
			100,00	100,00

b. Hasil Investasi

Berikut ini hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, dan 2008 DPP.

Tabel 5. Hasil Investasi Dana Pensiun Perhutani Tahun 2009 dan tahun 2008

No	Uraian	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Investasi			
	- Bunga Deposito	5.480.421.108	5.316.197.667	103.09
	- Bunga Obligasi/ BH Sukuk	14.258.601.384	32.526.761.177	43.84
	- Bunga Surat Berharga Negara	14.653.998.153	-	
	- Deviden	4.518.093.497	4.101.028.710	110.17
	- Laba (rugi) pelepasan saham	13.755.311.203	(7.936.112.859)	173.33
	- Laba (rugi) pelepasan obligasi	(2.552.657.871)	(212.966.744)	1.198.62
	- Laba (rugi) pelepasan reksadana	23.465.093.746	6.069.780.590	386.59
	Jumlah Pendapatan	73.578.861.220	39.864.688.541	184.57
2	Beban Investasi			
	- Beban transaksi		1.399.611	
	- Beban manajer investasi	688.008.191	915.092.382	75.18
	- Beban kustodian	487.125.202	529.708.083	91.96
	Jumlah beban investasi	1.175.133.393	1.446.200.076	81,26
3	Hasil Usaha Investasi	72.403.717.827	38.418.488.465	188,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil usaha investasi pada 2009 adalah sebesar Rp. 72.403.717.827,00. Jumlah tersebut meningkat 88,46% dari hasil usaha

investasi 2008. Sumbangan kenaikan terbesar berasal dari pelepasan reksadana sebesar Rp. 23.465.093.746,00. Namun, dalam laporan ini tidak ada penjelasan mengapa pelepasan obligasi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.552.657.871,00.

Hasil investasi yang sudah direalisasi tersebut ditambah hasil investasi yang belum direalisasi sebesar Rp. 116.084.786.586 menjadikan jumlah hasil investasi 2009 sebesar Rp. 188.488.514.395,00. Dengan total rata-rata investasi 2009 sebesar Rp. 532.384.764.144,00, **Return on Investment (ROI) 2009** adalah sebesar **35,40%**; dan dengan rata-rata aktiva bersih 2009 sebesar Rp. 618.098.045.652,00, diperoleh **Return on Assets (ROA)** sebesar **30,49%**.

Dibandingkan dengan target dalam Arahannya Investasi 2009 sebesar sekurang-kurangnya 11% setelah dikurangi biaya investasi, ROI 2009 **lebih tinggi 24,40%**. Sedangkan, dibandingkan target hasil investasi dalam Rencana Investasi 2009 sebesar 11,50%, ROI 2009 **lebih tinggi 23,90%**. Tabel berikut ini memperlihatkan ROI yang diperoleh berdasarkan jenis investasi.

Tabel 6. ROI berdasarkan Jenis Investasi

NO	Jenis Investasi	ROI 2009		
		Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	- Deposito Berjangka	9,5	11,67	
	- DOC		6,99	
	- Saham	16,00	61,49	
	- Obligasi/ Sukuk	10,00	12,42	
	- Reksadana	15,50	66,95	
	- Surat Berharga Negara	10,00	11,39	
2	Total Investasi	11,50	35,40	

c. Likuiditas

Dalam Pasal 14 Arahannya Investasi 2009 dinyatakan bahwa Pengurus harus menjaga likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari total investasi.

Likuiditas bulanan pada 2009 berkisar antara Rp. 19.307.728.485,00-Rp. 73.590.656.254,00 atau 3,18% - 12,97% dari total investasi bulanan. Sementara itu, total beban investasi, beban operasional, dan manfaat pensiun 2009 hanya sebesar Rp. 57.081.605.190,00 atau rata-rata sebesar Rp. 4,76 milyar sebulan. Maka, likuiditas

bulanan 1% dari total investasi sudah lebih dari cukup sehingga selebihnya dari 1% dapat diinvestasikan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih tinggi.

IV. Kepesertaan

Per 31 Desember 2009, jumlah peserta DPP tercatat sebanyak 19.530 orang yang terdiri atas Peserta Pasif dan peserta Aktif masing-masing sebanyak 8.360 dan 11.170 orang. Jika dibandingkan dengan data peserta per 31 Desember 2008, jumlah Peserta Aktif 2009 turun sebanyak 469 orang, dan Peserta Pasif naik sebanyak 949 orang. Dengan demikian, beban manfaat pensiun semakin meningkat dan pendapatan dari iuran semakin berkurang. Maka, agar tidak menjadi beban Pemberi Kerja, hasil investasi harus ditingkatkan

Tabel 7. Peserta Dana Pensiun Perhutani Tahun 2009 dan Tahun 2008

NO	PESERTA	31 DESEMBER 2009	31 DESEMBER 2008
1	2	3	4
1	Pasif	8.360	7.411*)
2	Aktif	11.170	11.639
3	Jumlah	19.530	19.050

*) Jumlah yang tertulis di Laporan Keuangan 2009 sebanyak 7.303 orang

V. Aktuaria

Hasil perhitungan aktuaria per 31 Desember 2009 yang dilakukan oleh Sumarti, FSAI dari PT Dian Artha Tama, Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perhitungan Aktuaria per 31 Desember 2009 dari Dana Pensiun Perhutani

NO	Uraian	31 DESEMBER 2009	31 DESEMBER 2008
1	2	3	4
1	Kekayaan untuk pendanaan DPP (Rp)	657.071.127.665	436.525.634.288
2	Kewajiban Solvabilitas (Rp)	686.837.452.148	758.489.504.283
3	Kewajiban Aktuaria (Rp)	721.748.430.638	807.007.963.267
4	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas	(29.766.324.483)	(283.631.715.414)
5	Surplus (Defisit) – (Rp)	(64.677.302.973)	(332.150.174.398)
6	Rasio Solvabilitas	95,66%	62,60%
7	Rasio Pendanaan	91,03%	58,84%
8	Kualitas Pendanaan	Tingkat ketiga	Tingkat ketiga
9	Iuran Normal	13,5%	14,1%
10	Iuran Tambahan	1.777.292.930	9.631.266.330

Meskipun kekayaan untuk pendanaan meningkat signifikan dari 2008 ke 2009, ternyata kekayaan tersebut belum mampu menutup baik kewajiban solvabilitas (95,66%) maupun kewajiban aktuarial (91,03%) sehingga **kualitas pendanaan berada pada peringkat tiga**. Ini berarti perhitungan aktuarial harus dilakukan setiap tahun. Iuran normal 2009 turun menjadi 13,5% dari 14,1% pada 2008 sehingga iuran Pemberi Kerja menjadi 8,5% karena peserta wajib mengiur sebesar 5%. Selain itu, iuran tambahan juga turun secara signifikan.

VI. Kesimpulan

1. Aktiva bersih akhir 2009 meningkat sebesar Rp257.015.853.092,00 dari aktiva bersih akhir 2008 sebesar Rp478.634.536.548,00 menjadi Rp735.650.389.640,00.
2. Pemberi Kerja belum melunasi iuran tambahan 2009 sehingga muncul sebagai piutang iuran tambahan sebesar Rp103.536.273.734,00 karena telah dikurangi dengan kelebihan iuran normal sebesar Rp3.223.934.896,00. Atas piutang tersebut, Pengurus telah mengenakan bunga keterlambatan iuran sesuai dengan Ayat 6 Pasal 25 PDP dari DPP.
3. Dibandingkan dengan tahun 2008, beban investasi dan operasional 2009 justru turun masing-masing sebesar 18,74% dan 9,95%. Sedangkan pembayaran manfaat pensiun 2009 meningkat 23,72% dari pembayaran manfaat pensiun 2008. Jika dibandingkan dengan RKA 2009 DPP, beban investasi dan beban operasional 2009 turun masing-masing sebesar 41,26% dan 23,78%. Adapun pembayaran manfaat pensiun 2009 naik sebesar 11,93%.
4. Penempatan pada reksadana melampaui batasan alokasi Rencana Investasi 2009, lebih tinggi sebesar 5,37% daripada rencananya.
5. DPP masih memiliki beberapa obligasi dengan peringkat id A- dan belum memisahkan antara obligasi dan sukuk.
6. Dalam Rencana Investasi 2009 tidak ada jenis investasi DOC. Namun, realisasi portofolio investasi 2009 menunjukkan adanya proporsi DOC sebesar 1,52%.
7. Dibandingkan dengan 2008, portofolio investasi 2009 berubah secara signifikan dengan meningkatnya investasi di saham dan reksadana.
8. Dibandingkan dengan target dalam Arahannya Investasi 2009 sebesar sekurang-kurangnya 11% setelah dikurangi biaya investasi, ROI 2009 **lebih tinggi 24,40%**. Sedangkan, dibandingkan target hasil investasi dalam Rencana Investasi 2009 sebesar 11,50%, ROI 2009 **lebih tinggi 23,90%**.
9. Likuiditas bulanan 1% dari total investasi sudah lebih dari cukup sehingga selebihnya dari 1% dapat diinvestasikan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih tinggi.

10. Beban manfaat pensiun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pensiunan dan pendapatan dari iuran semakin berkurang karena menurunnya jumlah peserta aktif.
11. Peningkatan kekayaan untuk pendanaan yang signifikan belum mampu menutup baik kewajiban solvabilitas (95,66%) maupun kewajiban aktuarial (91,03%) sehingga ***kualitas pendanaan berada pada peringkat tiga.***

VII. Saran

1. Pengurus hendaknya segera menagih Pemberi Kerja untuk melunasi iuran piutang iuran tambahan sebesar Rp103.536.273.734,00. Pengurus perlu juga mengecek apakah pengenaan bunga keterlambatan iuran sudah sesuai dengan Ayat 6 Pasal 25 PDP dari DPP.
2. Mengingat beban manfaat pensiun yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pensiunan dan menurunnya pendapatan dari iuran karena menurunnya jumlah peserta aktif, Pengurus hendaknya mengupayakan peningkatan

hasil investasi dibarengi dengan peningkatan efisiensi pada beban investasi dan operasional.

3. Portofolio dalam Rencana Investasi hendaknya dibuat lebih rinci dengan memperhatikan PMK 199/2008 dan Arahan Investasi. Dalam berinvestasi, Pengurus hendaknya tidak melanggar Rencana Investasi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
4. Pengurus hendaknya menambahkan waktu perolehan obligasi dan sukuk dalam rincian obligasi dan sukuk.
5. Dengan meningkatnya secara signifikan investasi di saham dan reksadana berarti risiko investasi juga semakin meningkat. Maka, Pengurus hendaknya lebih berhati-hati dalam mengelola investasi dengan senantiasa memperhatikan perubahan lingkungan investasi sehingga mampu mengoptimalkan hasil investasi dan meminimalkan risikonya.
6. Pengurus hendaknya menganalisis kembali kebutuhan likuiditas bulanan agar tidak terjadi likuiditas bulanan yang terlalu besar sehingga mengurangi kesempatan untuk mengoptimalkan hasil investasi.
7. Pengurus hendaknya mengupayakan peningkatan kekayaan untuk pendanaan untuk setidaknya dapat menutup kewajiban solvabilitas sehingga ***kualitas pendanaan dapat naik menjadi peringkat dua.***
8. Pengembangan sistem informasi DPPHT agar dilanjutkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta dan efektivitas dan efisiensi manajemen DPP, misalkan dalam penanganan keluhan.
9. Untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan maka pengurus DPPHT agar memperhatikan regenerasi SDM dan peningkatan kompetensi karyawannya.

Jakarta, 17 Mei 2010
Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Perhutani

A.N.S Kosasih